

PERAN POLITIK PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN PESANTREN

Arivan Mahendra¹

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
_uin@radenfatah.ac.id

Muhammad Sirozi²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
msirozi@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Dalam konteks politik pendidikan di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dan berpengaruh. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi NU memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren memiliki peran historis dan strategis dalam pembentukan karakter serta penyebaran nilai-nilai keislaman di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran politik PBNU berkontribusi dalam penguatan pendidikan pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). PBNU memiliki peran krusial dalam memperkuat pendidikan pesantren. Upaya PBNU dalam pengesahan Undang-Undang Pesantren, peningkatan kualitas pendidikan, serta kemandirian ekonomi pesantren menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dukungan ini memastikan pesantren tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berdaya saing tinggi, serta berkontribusi signifikan bagi pembangunan bangsa.

Kata Kunci: PBNU; Pesantren; Politik Pendidikan.

ABSTRACT

In the context of education politics in Indonesia, the role of Nahdlatul Ulama (NU) is not only as a stakeholder, but also as a proactive and influential agent of change. The Executive Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) as the highest institution in the NU organizational structure plays an important role in supporting and developing pesantren education. Pesantren education has a historical and strategic role in character building and the spread of Islamic values in Indonesia. Aim this paper for know the political role of PBNU contributes to strengthening pesantren education. This research is a qualitative study using the library research method. PBNU has a crucial role in strengthening pesantren education. PBNU's efforts in passing the Pesantren Law, improving the quality

of education, and the economic independence of pesantren show a strong commitment to the development of pesantren as an integral part of the national education system. This support ensures that pesantren remain relevant and able to produce graduates who are noble, knowledgeable, and highly competitive, and contribute significantly to nation building.

Keywords: *PBNU; Pesantren; Politics of Education.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Salah satu bidang di mana NU memiliki peran penting adalah dalam politik pendidikan (Daulay & Dalimunthe, 2021). Dalam konteks ini, NU bukan hanya menjadi pemangku kepentingan utama dalam menyuarkan aspirasi pendidikan Islam, tetapi juga berperan sebagai penggerak kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata serta berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia (Binfas, 2024).

Sejak awal berdirinya, NU telah memandang pendidikan sebagai salah satu sarana utama untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dan membangun karakter umat Islam yang berkualitas. Dengan jaringan pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang luas di seluruh Indonesia, NU telah menjadi pilar penting dalam menyebarkan pendidikan agama Islam sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sistem pendidikan nasional (Fathih & Amrullah, 2022).

Dengan nilai-nilai keislaman sebagai pijakan utamanya, NU terus berkomitmen untuk berkontribusi

dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik (Azca et al., 2021).

Pendidikan pesantren memiliki peran historis dan strategis dalam pembentukan karakter serta penyebaran nilai-nilai keislaman di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga sebagai benteng pertahanan budaya dan moralitas bangsa. Pesantren telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang berkontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa Indonesia (Nasution, 2020).

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan pesantren. NU didirikan oleh para ulama yang sebagian besar adalah pengasuh pesantren, sehingga perkembangan pesantren sangat terkait dengan perkembangan NU (Arifin, 2012). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi NU memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan pesantren.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran politik PBNU berkontribusi dalam penguatan pendidikan pesantren. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, PBNU berusaha memastikan bahwa pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data melalui pemahaman dan analisis teori-teori dari berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan. (Sugiyono, 2019).

Zed (2004) mengidentifikasi empat fase untuk melakukan studi perpustakaan: menyiapkan alat yang diperlukan, membuat bibliografi kerja, menjadwalkan waktu, dan membaca serta mendokumentasikan bahan penelitian. pengumpulan data dengan mencari sumber dan menyatukannya dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis isi dan analisis deskriptif digunakan dalam proses analisis. Proposisi dan gagasan tersebut didukung oleh analisis yang kritis dan menyeluruh terhadap bahan pustaka yang bersumber dari berbagai referensi (Adlini et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN **Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama**

KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947), seorang ulama terkemuka dari Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa

Timur, mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 31 Januari 1926 M, dengan bantuan para ulama yang tergabung dalam Komite Hijaz. Para ulama menyetujui pembentukan organisasi beserta namanya, dan menyerahkan amanah pelantikan kepada KH. Hasyim Asy'ari usai menunaikan istikharah. Hasilnya adalah KH. Hasyim Asy'ari telah mendapatkan kepercayaan dari gurunya, KH. Mohammad Kholil. Kelompok NU didirikan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi agama lama di nusantara guna mengimbangi reformasi Islam yang terus berkembang. (Humairah et al., 2023). Karena itulah, gerakan NU dikenal memiliki ciri dengan membawa nilai kearifan lokal serta resistensi kuat untuk mempertahankan budaya pesantren.

Pesantren cenderung menjadi lembaga dakwah NU yang paling menonjol, berpengaruh, dan tertua yang menawarkan pengajaran Islam. Pesantren terdiri dari 5 elemen yakni, kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran kitab kuning. Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan dalam bentuk lain (Sumarto, 2019).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam khas Indonesia. Pondok pesantren biasanya berlokasi di pedesaan, sehingga tidak disangka nilai-nilai tradisional yang ditanamkan pesantren sangat relevan dengan budaya masyarakat Islam pedesaan. Prinsip-prinsip kuno pesantren ini merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk

menanamkan keyakinan Islam (Ismayani et al., 2023).

Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa dipisahkan dari pesantren, karena organisasi ini lahir dari semangat para ulama pesantren untuk menjaga dan mengembangkan ajaran Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Didirikannya NU bertujuan untuk mempertahankan tradisi keagamaan yang moderat dan menjawab tantangan modernisasi serta kolonialisme yang saat itu tengah berlangsung. Para pendiri NU, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri, adalah tokoh-tokoh pesantren yang memiliki visi untuk menjadikan pesantren sebagai basis utama pendidikan dan dakwah Islam di Nusantara (Fadli & Sudrajat, 2020). Mereka menyadari pentingnya peran pesantren dalam membentuk karakter bangsa dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran.

Sejak awal, NU memiliki visi yang jelas mengenai pendidikan pesantren. Visi ini berakar pada keyakinan bahwa pesantren harus menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk kepribadian santri yang berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Pesantren diharapkan dapat melahirkan generasi yang mampu memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga mereka siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya (Asrori, 2020). Untuk mewujudkan visi ini, NU melalui Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU) terus berusaha memperkuat pendidikan pesantren dengan berbagai program dan kebijakan.

Dalam perkembangannya, PBNU memainkan peran politik yang signifikan dalam penguatan pendidikan pesantren. Mereka aktif dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk memastikan bahwa pesantren mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak dari pemerintah. Salah satu pencapaian penting adalah pengesahan Undang-Undang Pesantren yang memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pengembangan pesantren di Indonesia. Selain itu, PBNU juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan pesantren, seperti pelatihan manajemen, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber daya finansial dan non-finansial. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Visi PBNU terhadap pendidikan pesantren juga mencakup pemberdayaan ekonomi pesantren melalui inisiatif-inisiatif seperti koperasi dan usaha mikro. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat (Syakir, 2023). PBNU juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan keagamaan, memastikan bahwa pesantren tetap menjadi tempat penggemblengan akhlak dan spiritualitas yang kuat. Selain itu, PBNU mendorong pesantren untuk menjadi agen toleransi dan dialog antarbudaya, memperkuat

peran mereka dalam mempromosikan Islam yang ramah dan moderat.

Secara keseluruhan, sejarah dan visi PBNU terhadap pendidikan pesantren menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga dan mengembangkan tradisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang integral dalam membentuk generasi Muslim yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Melalui berbagai inisiatif politik dan program pemberdayaan, PBNU terus berupaya memastikan bahwa pesantren dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Kontribusi NU dalam Pendidikan Islam

Sejarah membuktikan bahwa peran dan kontribusi NU terhadap pendidikan bangsa sangat besar. Kontribusi tersebut semakin nyata jika kita menilik bagaimana lembaga pendidikan NU seperti Pondok Pesantren, Madrasah, dan Pesantren NU yang secara tradisi didirikan atas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam semangat Lillahi Ta'ala, kini dapat berkembang pesat dan bahkan menjadi pilihan utama masyarakat. (Humairah et al., 2023).

Nahdlatul Ulama merupakan ekspresi kontemporer kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya para kiai di bidang pendidikan. Kiai, Nahdlatul Ulama, dan pesantren selalu saling berhubungan dalam proses pembentukan masyarakat, solidaritas ini merupakan lembaga yang berperan

penting dalam kemajuan masyarakat Islam dan Islam pada umumnya. Oleh karena itu, organisasi-organisasi yang terlibat dalam sektor pendidikan perlu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu upaya NU untuk mencapai koherensi dan keutuhan yang luar biasa dalam perjuangan pendidikannya adalah dengan menekankan arah dan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan program pendidikan di lingkungan universitas. Modal pendidikan NU dirancang untuk memainkan peran unik dan berkontribusi signifikan terhadap upaya reformasi sistem pendidikan nasional. (Imam et al., 2015).

PBNU Dalam Penguatan Pendidikan Pesantren

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki peran yang sangat penting dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dalam upaya untuk memastikan bahwa pesantren memiliki lingkungan yang kondusif dan mendapatkan pengakuan yang layak dalam sistem pendidikan nasional, PBNU secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Advokasi kebijakan PBNU tidak hanya terbatas pada level legislasi, tetapi juga mencakup tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan.

PBNU sering mengadakan berbagai forum, seminar, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, serta komunitas pesantren itu sendiri. Melalui forum-forum ini, PBNU memfasilitasi

dialog antara para ulama, pengasuh pesantren, akademisi, dan pejabat pemerintah untuk membahas isu-isu terkait pendidikan pesantren dan mencari solusi bersama. Diskusi-diskusi ini menjadi wahana bagi PBNU untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak dan menyampaikan aspirasi pesantren kepada pembuat kebijakan.

Salah satu contoh konkrit dari peran advokasi PBNU adalah keterlibatannya dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Ferdiansyah, 2024). PBNU menyuarakan berbagai aspirasi dan kebutuhan pesantren dalam proses legislasi ini. Mereka mengadvokasi pengakuan formal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan institusi pendidikan lainnya dalam sistem pendidikan nasional (Hayati, 2019). Selain itu, PBNU juga berperan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pendidikan pesantren, termasuk standar pendidikan, kurikulum, akreditasi, dan sertifikasi guru.

Setelah Undang-Undang tentang Pesantren disahkan, PBNU terus memonitor implementasi kebijakan tersebut (Alawi, 2019). Mereka melakukan pemantauan terhadap proses penerapan undang-undang di lapangan dan mengumpulkan masukan dari pesantren-pesantren di berbagai daerah mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. PBNU kemudian menyampaikan hasil pemantauan dan

masukan tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Melalui peran advokasi yang proaktif dan berkelanjutan ini, PBNU berupaya untuk memastikan bahwa pesantren memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, pengakuan yang layak dalam sistem pendidikan nasional, serta lingkungan yang kondusif untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.

Selain itu, PBNU juga mengusulkan penetapan Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi santri dan pesantren dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Usulan ini didasarkan pada peran sentral pesantren dan santri dalam berbagai fase penting sejarah nasional, termasuk perjuangan kemerdekaan (Rastika, 2014).

Usulan ini mendapat respon positif dari pemerintah dan masyarakat luas. Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, merujuk pada resolusi Jihad yang diminta KH. Hasyim Asy'ari, menyuruh para santri untuk memperjuangkan tanah air. Penetapan ini bukan hanya sebagai simbol penghargaan, tetapi juga sebagai pengakuan formal terhadap kontribusi besar pesantren dan santri dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional setiap tahun menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk merayakan dan

mengapresiasi peran santri dan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Gufron, 2019).

Salah satu agenda wajib yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) yang bersifat keorganisasian. Dalam Konbes ini, NU menganalisis kesulitan dan prospek NU ke depan yang dirinci dalam program kerja Nahdlatul Ulama. Selain itu juga NU memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Berikut beberapa rekomendasi NU hasil Konbes NU tahun 2012 dan 2017 dalam bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan pesantren:

1. Prinsip-prinsip pesantren, yaitu kemandirian, keikhlasan, kerendahan hati, dan hidup sederhana, sangat sejalan dengan semangat Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pada keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang tinggi pada ayat 31 ayat (3). Konsekuensinya, sistem pendidikan nasional haruslah memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum pendidikan karakternya. (Ulama, 2012).
2. Terkait madrasah dan pesantren, Kementerian Agama RI sebaiknya: a) menghadirkan kembali Program Khusus Madrasah Aliyah; b) menawarkan bantuan pendidikan afirmatif berbasis Tahfidzul Qur'an kepada Madrasah Aliyah; c) menerbitkan nomenklatur guru madrasah

khusus untuk kesejahteraan mereka; d) menyelenggarakan program Akselerasi bagi guru Madrasah Diniyah agar mereka dapat memperoleh gelar Sarjana atau sederajat; dan e) mengkaji dan menerbitkan kembali PMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Diniyah dan Pondok Pesantren. (Ulama, 2012).

3. Pemerintah harus segera menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pesantren dan sarana pendidikan keagamaan lainnya sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor 7/DPR-RI/II/2016-2017 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor 43 agar dapat diberlakukan afirmatif. kebijakan. Agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam memerangi ekstremisme dan radikalisme, peraturan ini harus mengontrol peningkatan pesantren dan fasilitas pendidikan agama. (Ulama, 2017).
4. Untuk mendorong kemajuan pesantren dan pendidikan agama melalui kebijakan, program, dan anggaran, pemerintah harus membentuk kementerian khusus yang membidangi hal tersebut. (Ulama, 2017).

Selain itu, pada tahun 2023, Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama mendesak pemerintah untuk membentuk struktur birokrasi yang lebih kuat, seperti Direktorat Jenderal yang membawahi dan mengatur pesantren, atau menerbitkan peraturan di tingkat keputusan presiden.

Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah memberikan dua rekomendasi. Pertama, direkomendasikan agar pemerintah segera merancang peraturan berdasarkan UU Pesantren, dengan memberikan perhatian khusus pada ketentuan yang berkaitan dengan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat (Indiraphasa, 2023).

Usulan kedua dari PBNU menyarankan agar dibentuk kerangka birokrasi yang lebih kuat untuk mengawasi pesantren, dimulai dari Direktorat Jenderal, karena cakupan anggaran dasar pesantren sangat luas (Indiraphasa, 2023). Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah pesantren dan terbatasnya anggaran serta luasnya cakupan Undang-Undang Pesantren tersebut.

Pesantren memiliki beberapa tujuan, antara lain pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengabdian dakwah. Sejauh ini, beberapa fungsi tersebut belum dilaksanakan secara optimal; Dua fungsi terakhir, yaitu fungsi dakwah dan pemberdayaan, belum menemukan peraturan turunannya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat fungsi-fungsi tersebut merupakan hal mendasar bagi semua kementerian, tidak hanya Kementerian Agama. Mengingat luasnya cakupan UU Pesantren dan banyaknya jumlah pesantren, maka Musyawarah Nasional NU 2023 menyepakati bahwa peraturan turunan setingkat Perpres sangat diperlukan untuk menjamin amanah UU Pesantren terlaksana secara maksimal, begitu pula dengan

pembentukan struktur birokrasi yang lebih kuat seperti Direktorat Jenderal.

D. KESIMPULAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki peran politik yang sangat penting dalam penguatan pendidikan pesantren di Indonesia. Melalui advokasi kebijakan, PBNU berhasil memperjuangkan pengakuan formal pesantren dalam sistem pendidikan nasional, seperti terlihat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Selain itu, PBNU aktif dalam penguatan kelembagaan pesantren melalui program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan di pesantren.

Penyediaan sumber daya juga menjadi fokus PBNU dengan memberikan bantuan finansial dan non-finansial, termasuk beasiswa bagi santri dan dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan. Implementasi program PBNU dalam penguatan pendidikan pesantren, seperti program "Madrasah Nahdlatul Ulama" dan pengembangan kurikulum berbasis teknologi, menunjukkan komitmen PBNU dalam memajukan pesantren agar dapat bersaing dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pengusulan dan penetapan Hari Santri Nasional oleh PBNU adalah contoh nyata dari bagaimana organisasi ini menghargai dan mengakui peran penting santri dalam sejarah dan pembangunan bangsa. Dengan demikian, PBNU tidak hanya

berperan sebagai pengawal tradisi keislaman, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia. Keseluruhan upaya ini menunjukkan betapa pentingnya peran politik PBNU dalam memastikan bahwa pesantren terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Alawi, A. (2019). *PBNU Minta UU Pesantren Terus Dikawal dan Disosialisasikan*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-minta-uu-pesantren-terus-dikawal-dan-disosialisasikan-4j9rx>
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan pesantren di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 40–53.
- Asrori, S. (2020). Lanskap moderasi keagamaan santri, refleksi pola pendidikan pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 16–26.
- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). Keislaman dan kebangsaan: telaah pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 109–130.
- Ferdiansyah, M. (2024). *Rois Syuriah PBNU: Negara Wajib Mengawal Undang-Undang Pesantren*. Pondok Pesantren Nurul Jadid. <https://www.nuruljadid.net/15854/rois-syuriah-pbnu-negara-wajib-mengawal-undang-undang-pesantren>
- Gufron, I. A. (2019). Santri dan Nasionalisme. *Islamic Insights Journal*, 1(1), 41–45.
- Hayati, N. R. (2019). Politik dan Pendidikan Nahdlatul Ulama. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 3(1), 58–74.
- Humairah, A. E., Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Eksistensi Nahdlatul Ulama Dan Pengaruhnya Dalam Bidang Pendidikan Islam. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1218–1224.
- Imam, S. F., Sutejo, S., Abid, R., Fajar, M., & Pramono, M. S. (2015). *Membaca dan Menggagas NU Ke Depan Senarai Pemikiran Orang Muda NU*. Terakata.
- Indiraphasa, N. S. (2023). *Dua Rekomendasi Munas NU soal Implementasi UU Pesantren*. NU Online. https://www.nu.or.id/nasional/dua-rekomendasi-munas-nu-soal-implementasi-uu-pesantren-CXrck#google_vignette
- Ismayani, I., Warisno, A., Anshori, A., & Andari, A. (2023). Pesantren Dan Pembaruan: Arah Dan Implikasi. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 161–170.
- Nasution, N. A. (2020). Lembaga Pendidikan Islam Pesantren. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 36–52.

- Rastika, I. (2014). *PBNU Usulkan Hari Santri Nasional 22 Oktober, Bukan 1 Muharam*. Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/17050441/PBNU.Usulkan.Hari.Santri.Nasional.22.Oktober.Bukan.1.Muharam>
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumarto, S. (2019). Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Keislaman. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 2(02).
- Syakir, M. (2023). *Bukan Hanya Pusat Pendidikan, Pesantren Juga Sentra Pengembangan Ekonomi*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/bukan-hanya-pusat-pendidikan-pesantren-juga-sentra-pengembangan-ekonomi-eUQ1A>
- Ulama, P. B. N. (2012). *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Konbes NU 2012*. Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Ulama, P. B. N. (2017). *Keputusan Munas Alim Ulama Konbes NU 2017*. Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.